

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan nilai, kepentingan, atau ideologi tertentu, cara partai politik memperjuangkan hal tersebut adalah dengan mendapatkan kekuasaan politik, dalam sistem demokrasi, kekuasaan itu diperoleh secara sah melalui pemilihan umum (Pamungkas, 2011:5). Artinya, partai politik tidak bisa mendapatkan kekuasaan dengan cara sembarangan, tetapi harus mengikuti aturan demokrasi yaitu melalui pemilu. Adanya pemilu tentu menjadikan rakyat memegang peranan yang sangat penting sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan jabatan-jabatan politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Melalui pemilu, rakyat memiliki keleluasaan untuk menentukan individu atau partai politik yang diberi kepercayaan untuk menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui jalur eksekutif maupun legislatif. Karenanya, partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam pemilu, menjadikannya sebagai salah satu syarat utama agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa partai politik, rakyat tidak memiliki saluran resmi untuk menyalurkan aspirasi dan memilih wakilnya dalam pemerintahan.

Di Indonesia, pentingnya partai politik ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa partai politik dibentuk atas dasar kesamaan cita-cita dan kehendak untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan kata lain, partai politik tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Apabila partai politik tidak mampu menjalankan tanggung jawab tersebut, misalnya gagal menyuarakan aspirasi rakyat atau tidak memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka kepercayaan rakyat terhadap partai akan menurun. Akibatnya, partai politik bisa kehilangan dukungan dan pemilih pada pemilu berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi partai

politik tidak terlepas dari peran dan fungsinya sebagai partai politik dan keberlangsungan peran dan fungsinya tersebut yang nantinya akan menentukan wajah demokrasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh E.E. Schattschneider dalam Pamungkas (2011:63), buruknya wajah partai politik akan berimplikasi pada buruknya kualitas demokrasi, sebaliknya semakin baik wajah partai politik maka semakin baik pula kinerja demokrasi. Pandangan ini menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak terletak pada banyaknya jumlah partai politik yang ada, melainkan pada sejauh mana partai-partai tersebut memiliki kekokohan organisasi dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika politik yang sedang berlangsung. Dan partai politik hanya akan menjadi kokoh sejauh ia mampu melambangkan dan mempertahankan dukungan massa. Kekokohan sebuah partai politik mencerminkan luas dan solidnya basis dukungan yang dimiliki, sekaligus menunjukkan derajat pelembagaan partai politik tersebut.

Dengan demikian, kekuatan partai politik tidak hanya diukur dari keberhasilannya dalam memenangkan pemilu, tetapi juga dari sejauh mana partai mampu bertahan sebagai institusi yang stabil, memiliki struktur organisasi yang jelas, aturan internal yang mapan, serta nilai dan ideologi yang terinternalisasi di kalangan kader dan pendukungnya. Partai politik yang terlembaga dengan baik cenderung mampu menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara konsisten dan berkelanjutan, serta lebih adaptif dalam merespons perubahan dan tuntutan masyarakat. Sebaliknya, partai politik yang memiliki tingkat pelembagaan yang lemah akan lebih rentan menghadapi berbagai persoalan internal, seperti konflik kepengurusan, rendahnya loyalitas kader dan pemilih, serta menurunnya kepercayaan publik.

Sebagaimana pendapat Samuel P. Huntington yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang yang mencapai derajat stabilitas politik yang tinggi setidaknya memiliki satu partai politik yang berwibawa dan terlembaga dengan baik (Pamungkas, 2011:70). Lebih lanjut, pelembagaan partai politik menurut Huntington dapat diartikan sebagai proses pembentukan dan penguatan organisasi agar memiliki pola dan nilai yang stabil (Pratama et al., 2022:2). Sementara Vicky

Randall dan Lars Svasan, mendefinisikan pelebagaan partai sebagai suatu proses mengakarnya partai politik secara struktural dan kultural, secara struktural, pelebagaan tercermin dalam pola perilaku organisasi, sedangkan secara kultural, terlihat dari terbentuknya sikap dan budaya politik yang terintegrasi (Randal & Svasand, 2002:12). Randall dan Svasan kemudian membagi pelebagaan partai politik itu ke dalam dua aspek yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural.

Konsep yang dikemukakan oleh Randal dan Svasand tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh yang merumuskan empat aspek utama dalam pelebagaan partai politik. Pertama, pengakaran di masyarakat yakni sejauh mana partai politik memiliki basis dukungan yang kuat dan stabil di tengah masyarakat. Kedua, otonomi yaitu partai diharuskan untuk mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada individu di internal partai maupun dari luar partai. Ketiga, organisasi yakni bagaimana struktur kepengurusan dan para anggotanya bekerja secara serius dalam aspek administrasi serta menjalankan tindakan yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan partai. Keempat, koherensi yang merujuk pada kesatuan sikap dan tindakan partai, termasuk konsistensi dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di internal partai (Basedau & Stroh, 2008:8-9). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh di berbagai negara di Benua Afrika, ditemukan bahwa tingkat pelebagaan partai politik itu ternyata memang menjadi salah satu faktor penentu dalam perolehan suara partai pada saat pemilu.

Temuan yang dikemukakan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroh tersebut kemudian menjadi sangat relevan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu, mengenai kondisi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung pada pemilu legislatif tahun 2024. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik tertua sekaligus terbesar di Indonesia. Partai ini merupakan kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang resmi berdiri pada 10 Januari 1973. PDI terbentuk melalui fusi lima partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Murba, Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) (Kinasih et al., 2024:47). Menjelang pemilu 1999, di bawah

kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, PDI kemudian mengalami transformasi dan berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) (Kinasih et al., 2024:47).

PDI Perjuangan baru-baru ini di Kabupaten Bandung berdasarkan pemantauan penulis terhadap pemilu legislatif tahun 2024, tengah menghadapi persoalan yang cukup serius. Di mana hasil pemilu legislatif pada periode tersebut memperlihatkan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan mengalami penurunan suara yang cukup signifikan. Penurunan ini tidak hanya terjadi pada pemilu legislatif tahun 2024, tetapi juga telah terlihat sejak pemilu sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tren penurunan elektoral yang berlangsung secara berkelanjutan dalam dua periode pemilu terakhir. Dampak dari penurunan perolehan suara tersebut juga berimbas pada berkurangnya jumlah kursi yang diperoleh PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Bandung, bisa dilihat pada **tabel 1.1**.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Bandung

Partai Politik	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PKB	5	6	12
Partai Gerindra	7	7	6
PDI Perjuangan	9	7	4
Partai Golkar	12	11	9
Partai NasDem	2	5	6
PKS	6	10	7
PAN	2	4	4
Partai Demokrat	5	5	6
Partai Hanura	1	0	0
PPP	1	0	0
Jumlah Anggota	50	55	55

Sumber: KPU Kabupaten Bandung (kpu.go.id, 2024)

Berdasarkan data pada **tabel 1.1**, menunjukan bahwa pemilu legislatif tahun 2019 menjadi awal penurunan dukungan elektoral bagi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung, sementara pemilu legislatif tahun 2024 menjadi titik terendah bagi partai tersebut setelah sempat keluar sebagai salah satu partai pemenang dengan memperoleh 9 kursi dengan total suara sebanyak 298.103 pada tahun 2014.

Keberhasilan PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2014 di daerah ini ternyata tidak dapat dipertahankan pada pemilu-pemilu selanjutnya. Di mana pada pemilu legislatif tahun 2019, perolehan kursi PDI Perjuangan mengalami penurunan menjadi hanya 7 kursi dengan total suara sebanyak 238.997 suara. Posisi PDI Perjuangan yang sebelumnya sempat menempati urutan kedua ini kemudian tergeser oleh PKS yang memperoleh 273.111 suara, yang jika dialokasikan ke kursi maka PKS pada saat itu memperoleh 10 kursi.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Bandung

Nama Partai Politik	Perolehan Suara		
	2014-2019	2019-2024	2024-2029
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	140.396	226.643	447.466
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	163.270	248.866	221.707
PDI Perjuangan	298.103	238.997	155.443
Partai Golongan Karya (Golkar)	390.979	373.169	316.830
Partai Nasional Demokrat (NasDem)	91.215	124.136	156.191
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	141.993	273.111	254.887
Partai Amanat Nasional (PAN)	103.397	117.780	160.648
Partai Demokrat	140.993	140.788	205.860
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	92.158	17.970	9.176
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	31.641	43.420
Partai Bulan Bintang (PBB)	-	31.880	9.466
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	67.610	40.430	63.001
Partai Garuda	-	6.958	3.542
Partai Berkarya	-	30.601	-
Partai Persatuan Indonesia	-	58.976	-
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	-	2.230	-
Partai Buruh	-	-	13.074
Partai Gelora	-	-	27.658
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	-	-	2.186
Partai Perindro	-	-	19.152
Partai Ummat	-	-	10.145

Sumber: KPU Kabupaten Bandung (jdih.kpu.go.id, 2019 dan 2024)

Pada pemilu legislatif tahun 2024 perolehan suara tersebut semakin turun drastis, di mana berdasarkan data pada **tabel 1.2**, menunjukan bahwa suara PDI Perjuangan merosot tajam, dari yang awalnya PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2019 masih meraih 238.997 suara dengan perolehan 7 kursi, maka pada pemilu legislatif tahun 2024 menjadi hanya 155.443 suara yang jika

dialokasikan PDI Perjuangan hanya memperoleh 4 kursi di DPRD Kabupaten Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi PDI Perjuangan masih belum mampu bangkit dari trend penurunanya. Bahkan partai ini justru kembali kehilangan basis dukungan yang cukup signifikan.

Adapun, jika kita tarik ke tingkat nasional ternyata kondisi suara yang diraih oleh PDI Perjuangan cenderung tetap stabil, di mana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2025), PDI Perjuangan sempat memperoleh 23.673.018 suara (18,96%) pada pemilu legislatif tahun 2014, kemudian naik menjadi 27.053.961 suara (19,33%) pada pemilu legislatif tahun 2019 dan kembali turun menjadi 25.387.279 suara (16,72%) pada pemilu legislatif tahun 2024. Meskipun pada pemilu legislatif tahun 2024 PDI Perjuangan mengalami penurunan suara dan jumlah kursi juga, jika dibandingkan dengan pemilu legislatif sebelumnya (2014 dan 2019), tetapi hal tersebut tidak serta-merta membuat PDI Perjuangan kalah dalam kontestasi nasional, sebab penurunan suaranya pun tidak drastis dan partai ini masih mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di DPR RI, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 1.3**.

Tabel 1.3 Perolehan Suara PDI Perjuangan Pada Tingkat Nasional

Pemilu	Perolehan Suara		Perolehan Kursi
	Jumlah	Persentase (%)	
1999-2004	35.621.436	33.75	153
2004-2009	21.026.629	18.53	109
2009-2014	14.576.388	14.01	94
2014-2019	23.673.018	18.96	109
2019-2024	27.053.961	19.33	128
2024-2029	25.387.279	16.72	110

Sumber: Badan Pusat Statistik (*bps.go.id*, 2025)

Hal tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi penulis, mengapa pada level nasional PDI Perjuangan masih relatif stabil, sementara pada tingkat daerah khususnya Kabupaten Bandung partai ini justru mengalami penurunan suara secara konsisten dan cukup signifikan. Yang lebih menariknya, penurunan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung terjadi justru pada periode ketika partai ini secara nasional berada di puncak popularitas, yakni pada pemilu tahun 2019 masa

di mana PDI Perjuangan berhasil mengantarkan Joko Widodo memenangkan pemilihan presiden untuk kedua kalinya.

Perbedaan tren antara tingkat nasional yang relatif stabil dan tingkat daerah yang mengalami penurunan drastis ini, menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor kontekstual di Kabupaten Bandung yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui dinamika nasional. Kondisi inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini, karena penurunan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung terjadi dari sebelum pemilu legislatif tahun 2014, maka masalahnya tidak hanya terkait kegagalan strategi kampanye saja, tetapi adanya persoalan yang lebih mendasar, yaitu melemahnya pelembagaan partai di tingkat lokal. Pelembagaan partai politik pada dasarnya ditandai oleh kemampuan partai dalam menjaga stabilitas organisasi dan mempertahankan basis sosialnya. Namun dalam hal ini, PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung tampak kehilangan kapasitas tersebut. Sementara, partai-partai berbasis keagamaan seperti PKB justru menunjukkan trend yang berlawanan.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bandung (2014 dan 2019), PKB di Kabupaten Bandung ternyata berhasil meningkatkan jumlah kursi dan suaranya secara konsisten dari 5 kursi pada 2014 (140.396), menjadi 6 kursi (226.643 suara) pada 2019, dan melonjak tajam menjadi 12 kursi (447.466 suara) pada 2019, menggeser dominasi Partai Golkar yang selama ini dikenal memiliki basis elektoral kuat di wilayah tersebut. Hal serupa juga terlihat pada PKS yang pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kabupaten Bandung hanya memperoleh 6 kursi (141.993 suara), kemudian naik menjadi 10 kursi (273.111 suara) pada 2019 dan masih mampu mempertahankan basis dukungan yang kuat dengan 7 kursi (254.887 suara) pada 2019. Sebaliknya partai-partai nasionalis seperti Golkar dan PDI Perjuangan justru mengalami penurunan di wilayah tersebut.

Melihat hal tersebut, Kabupaten Bandung menjadi menarik untuk dikaji karena secara empirik menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam konfigurasi kekuatan partai politik, fenomena ini tidak bersifat temporer ataupun hanya muncul pada satu siklus pemilu, tetapi terjadi secara konsisten dalam dua pemilu terakhir yaitu 2019 dan 2019. Oleh karena itu, dinamika tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis strategi kampanye atau pendekatan marketing politik

sebagaimana yang banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Kesenjangan inilah yang kemudian membuka ruang penelitian bagi penulis untuk mengkaji penyebab penurunan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung pada pemilu legislatif tahun 2024 melalui pendekatan pelemagaan partai menurut Matthias Basedau dan Alexander Stroh, sehingga memungkinkan penulis untuk menelusuri faktor-faktor yang lebih struktural dan mendasar terkait penyebab PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung mengalami penurunan perolehan suara.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan menarik penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana kondisi pelemagaan partai politik PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung, sehingga berperan terhadap penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024. Maka dalam penelitian ini, penulis mengakat judul penelitian tentang **“Analisis Penurunan Perolehan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengakaran PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung berperan dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024?
2. Bagaimana otonomi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung berperan dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024?
3. Bagaimana organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung berperan dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024?
4. Bagaimana koherensi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung berperan dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran pengakaran PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024.
2. Untuk menganalisis peran otonomi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024.
3. Untuk menganalisis peran organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024.
4. Untuk menganalisis peran koherensi PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung dalam penurunan perolehan suara pada pemilu legislatif tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun dalam penerapan praktis, sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Politik, khususnya dalam kajian mengenai partai politik. Melalui temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan solusi agar kedepannya partai politik lain tidak mengalami penurunan suara seperti yang dialami PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bandung. Serta menjadi dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengkaji fenomena yang sama.

2. Kegunaan Praktis

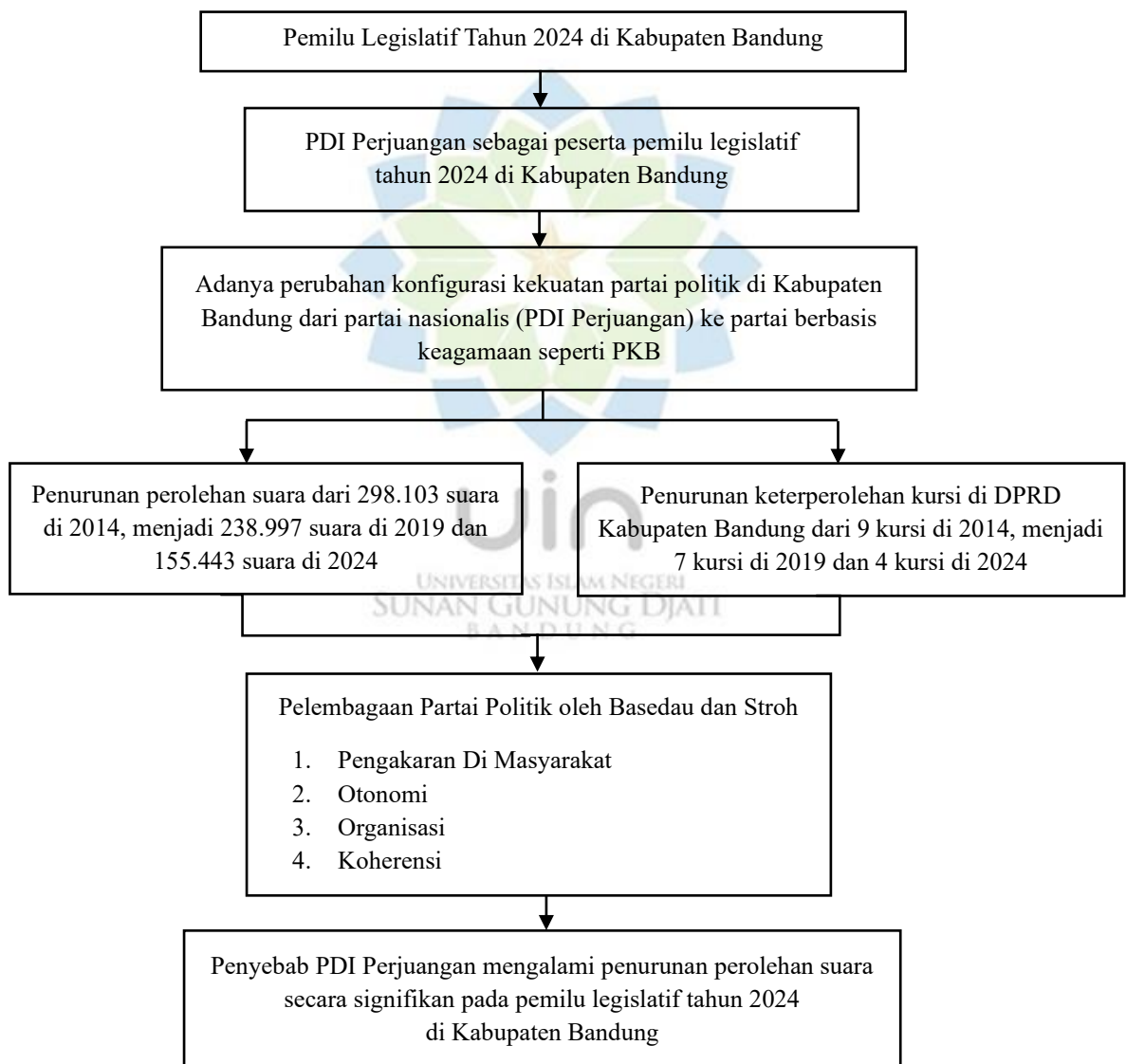
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan evaluasi sekaligus catatan kritis, terutama bagi para elit PDI Perjuangan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota manapun, dalam merumuskan langkah-langkah strategis dan keberlangsungan pelebagaan partai politik pada kontestasi pemilu legislatif berikutnya.

E. Kerangka Berpikir

Untuk memperjelas bagaimana arah analisis dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sebuah kerangka berpikir sebagaimana ditampilkan pada

gambar 1.1. Kerangka ini menggambarkan bagaimana alur konseptual yang digunakan oleh penulis untuk menjelaskan posisi permasalahan, sebab-akibat, variabel-variabel yang dianalisis, serta keterkaitan logis antar unsur yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian. Dengan adanya kerangka ini, proses penelitian dapat disajikan secara lebih sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam. Berikut lebih jelasnya mengenai alur kerangka berpikir dari penulis.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Penulis



Sumber: Diolah oleh Penulis

Kerangka berpikir di atas merupakan alur rancangan dalam penelitian penulis, di mana penelitian ini dimulai dari adanya pemilihan umum legislatif tahun 2024 yang diselenggarakan diberbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung. Dalam kontestasi tersebut, PDI Perjuangan menjadi salah satu peserta yang turut berkompetisi memperebutkan kursi legislatif di tingkat daerah. Namun, PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung pada periode terakhir ini mengalami dinamika politik yang menurut penulis menarik untuk dikaji, terutama terkait penurunan perolehan suara dan kursi secara konsisten dan begitu signifikan dibandingkan pada periode pemilu legislatif sebelumnya (2014 dan 2019).

Fenomena ini diduga berkaitan dengan adanya perubahan signifikan dalam konfigurasi kekuatan partai politik di Kabupaten Bandung, dari partai nasionalis seperti PDI Perjuangan ke partai berbasis keagamaan seperti PKB. Pergeseran ini kemudian berdampak pada penurunan suara PDI Perjuangan pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan hanya memperoleh 238.997 suara dan kembali mengalami penurunan menjadi 155.443 suara pada pemilu legislatif tahun 2024, serta penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Bandung dari 7 kursi kemudian menurun lagi menjadi 4 kursi, setelah sempat keluar sebagai partai pemenang pada pemilu legislatif tahun 2014.

Untuk menelaah persoalan tersebut secara lebih sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka pelebagaan partai politik dari Matthias Basedau dan Alexander Stroh, yang mencakup empat indikator utama: Pertama, pengakaran di masyarakat yaitu sejauh mana partai politik memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Kedua, otonomi yaitu partai diharuskan untuk mampu berdiri sendiri tanpa ketergantungan pada individu dalam internal partai maupun kelompok dari luar partai. Ketiga, organisasi yakni bagaimana struktur kepengurusan dan para anggotanya bekerja secara serius dalam aspek administrasi serta menjalankan tindakan yang berorientasi sepenuhnya pada kepentingan partai. Keempat, koherensi yang merujuk pada kesatuan sikap dan tindakan partai, termasuk konsistensi dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di internal partai.

Dengan menggunakan pendekatan pelebagaan partai politik dari Matthias Basedau dan Alexander Stroh ini, penulis berupaya untuk menganalisis dan

mengidentifikasi lebih dalam lagi apa yang menjadi penyebab melemahnya kinerja PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung, sehingga berdampak pada penurunan perolehan suara PDI Perjuangan di Kabupaten Bandung pada pemilu legislatif tahun 2024.

